

# ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Maria \*)

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah kota Palembang dalam kaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah kota Palembang pada pemerintah pusat dan provinsi. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2008 sampai 2011 masih rendah sekali berada pada tingkat kurang dari 25%. Namun demikian, rasio ketergantungan setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengelolaan PAD menuju tingkat kemandirian yang lebih baik.

*Kata kunci: rasio kemandirian, rasio ketergantungan*

### I. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 (revisi UU No. 22/1999) tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 (revisi UU No. 25/1999) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai hak dan kewenangan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah masalahnya bukan hanya pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, semangat desentralisasi, demokrasi transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Yani: 2004).

Penyelenggaraan otonomi di tiap daerah tentu berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Perbedaan potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah mengakibatkan perbedaan besar kecilnya penerimaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan salah satu unsur penting sebagai sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika PAD yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi segala pembelanjaan operasional, maka pemerintah menggunakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar aktivitas pembelanjaan maupun pembiayaan dapat dilaksanakan. Dari besar kecilnya PAD suatu pemerintahan daerah dapat dinilai mengenai kemandirian dan kemampuan pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi, pemerintah kota Palembang memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan penerimaan. Sejauh ini pemerintah kota Palembang dinilai belum mengoptimalkan PADnya. Hal

---

\*) Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Plg

ini dilihat dari pendapatan transfer tahun 2012 sebesar Rp1.029.652.107.529 sementara PAD sebesar Rp210.049.457.241 sehingga dapat dikatakan belum optimal. Oleh sebab itu, sampai saat ini sebagian besar pembiayaan dan pembelanjaan Pemerintah Kota Palembang masih tergantung pada alokasi dana yang diterima dari pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah adalah bagaimana tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah kota Palembang sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

## **II Landasan Teori**

### **2.1 Pengertian PAD**

Menurut Tanjung (2007:97), PAD terdiri dari:

- a. **Pendapatan Pajak Daerah**  
Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak atas potensi daerah yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah.
- b. **Pendapatan Retribusi Daerah**  
Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan retribusi atas pemanfaatan jasa yang dimiliki daerah.
- c. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
Pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah.
- d. **Lain-Lain PAD yang Sah**  
Pendapatan yang bukan berasal dari pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai peraturan daerah dan dipungut dan disetorkan kepada kas daerah.

Pengertian pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) tahun 2005, yaitu: “ semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

### **2.2 Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007:232), analisis rasio keuangan daerah adalah:

Suatu kegiatan analisa terhadap laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya atau dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan daerah antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, dan aktivitas. Menurut Halim (2007:232), rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan adalah:

Rasio kemandirian, menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga dapat menjadi penilaian terhadap besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diterima yang dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Diterima}}$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah, menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam ketergantungan terhadap pemerintahan provinsi/pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah hitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat dan/atau pemerintahan provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Ada empat macam pola yang memperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” (Halim, 2007), antara lain:

a. Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah

daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola hubungan *konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selanjutnya, keempat pola hubungan di atas menunjukkan perbedaan tingkat kemandirian suatu daerah. Untuk melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Standar Rasio Kemandirian**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	<i>Instruktif</i>
Rendah	25% - 50%	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50% - 75%	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75% - 100%	<i>Delegatif</i>

Sumber: Nadeak, 2003

Selain itu, rasio kemandirian juga dapat dilihat berdasarkan Standar Penilaian Kinerja (SPK) BAPPENAS yang digunakan oleh BAPPEDA mengenai tolok ukur penilaian kemandirian, yaitu:

“suatu daerah dikatakan telah mandiri dan mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh telah mampu membiayai minimal 25% Pengeluaran

yang dilakukan dalam peyelenggaraan otonomi daerah”.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah kota Palembang yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2007 sampai dengan 2011. Data yang digunakan merujuk pada Hariwijaya dan Basri (2005) yaitu data sekunder berupa laporan keuangan hasil auditan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter sehubungan dengan LRA dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **a. Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2009:7-8) ada dua jenis metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode ilmiah (*scientific*) karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif dan terukur serta rasional sehingga lebih cenderung menggunakan data yang bersifat sistematis dalam bentuk angka-angka. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

### **b. Teknik Analisis Data**

Menurut Arikunto (2006) analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dan pengolahan data dimaksud untuk menjawab masalah

yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki melalui penghitungan secara kuantitatif.

Dalam analisis kuantitatif peneliti menggunakan formula mengenai rasio PAD dan komponennya; pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PHPKD) yang dipisahkan terhadap total pendapatan (rasio kemandirian). Selain itu digunakan juga formula mengenai pendapatan transfer terhadap total pendapatan (rasio ketergantungan). Rasio kemandirian dan ketergantungan yang digunakan merujuk pada Halim (2007).

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **3.1 Analisis Perbandingan Laporan Realisasi Penerimaan**

Berdasarkan LRA (pendapatan daerah) perbandingan tahun 2008 dan tahun 2009, bahwa terjadi kenaikan pada pos-pos pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan PAD sebesar Rp46.277.387.662 (26,86%). Pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pusat/provinsi juga mengalami kenaikan sebesar Rp42.798.548.357 (4,65%). Pos lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami kenaikan sebesar Rp37.792.125.394,37 (32,38%).

Tabel 3.1 sampai tabel 3.3 menunjukkan realisasi pendapatan daerah kota Palembang tahun 2008-2011.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2008 dan 2009**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Uraian	Realisasi Anggaran	
	Tahun 2008	Tahun 2009
Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Pajak Daerah	69.350.000.000	87.485.932.360
Pendapatan Retribusi Daerah	65.332.735.137	64.629.000.000
PHPKD yang Dipisahkan	8.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan PAD yang disahkan	29.632.539.011	56.477.729.450
<b>Jumlah</b>	<b>172.315.274.148</b>	<b>218.592.661.810</b>
Pendapatan Transfer		
Dana bagi hasil pajak	128.347.959.847	148.256.450.028
Dana bagi hasil SDA	69.989.685.850	114.517.662.026
Dana alokasi umum	716.129.540.000	689.108.622.000
Dana alokasi khusus	8.387.000.000	11.770.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>920.854.185.697</b>	<b>963.652.734.054</b>
Lain-lain Pendapatan yang sah	116.697.764.687,39	154.489.890.081,76
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>1.209.867.224.532,39</b>	<b>1.336.735.285.945,76</b>

Sumber : Data Olahan dari Pemerintah Kota Palembang 2008-2009

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009 dan 2010**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Uraian	Realisasi Anggaran	
	Tahun 2009	Tahun 2010
Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Pajak Daerah	87.485.932.360	93.420.835.800
Pendapatan Retribusi Daerah	64.629.000.000	74.393.402.273
PHPKD yang Dipisahkan	10.000.000.000	20.000.000.000
Pendapatan PAD yang disahkan	56.477.729.450	22.235.219.168,57
<b>Jumlah</b>	<b>218.592.661.810</b>	<b>210.049.457.241,57</b>
Pendapatan Transfer		
Dana bagi hasil pajak	148.256.450.028	162.137.869.676
Dana bagi hasil SDA	114.517.662.026	142.500.198.853
Dana alokasi umum	689.108.622.000	696.587.039.000
Dana alokasi khusus	11.770.000.000	28.427.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>963.652.734.054</b>	<b>1.029.652.107.529</b>
Lain-lain Pendapatan yang sah	154.489.890.081,76	260.332.458.943,54
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>1.336.735.285.945,76</b>	<b>1.500.034.023.714,11</b>

Sumber : Data Olahan dari Pemerintah Kota Palembang 2009-2010

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun 2009 dan 2010, indikasi penurunan PAD sebesar Rp 8.543.204.568,43 dengan persentase (3,91%). Hal ini sebabkan pos lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp4.242.510.281,43 (60%). Pendapatan yang diterima dari dana perimbangan atau dana transfer

mengalami kenaikan sebesar Rp 65.999.373.475 (6,85%). Pada pos lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 105.842.568.861,78 (68,51%).

Selanjutnya dilakukan perbandingan realisasi pendapatan untuk tahun 2010 dengan tahun 2011 seperti pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010 dan tahun 2011**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Tahun 2010	Tahun 2011
Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Pajak Daerah	93.420.835.800	172.117.431.035
Pendapatan Retribusi Daerah	74.393.402.273	90.795.550.515,69
PHPKD yang Dipisahkan	20.000.000.000	25.570.000.000
Pendapatan PAD yang disahkan	22.235.219.168,57	69.522.182.615,30
<b>Jumlah</b>	<b>210.049.457.241,57</b>	<b>358.005.164.165,99</b>
Pendapatan Transfer		
Dana bagi hasil pajak	162.137.869.676	24.762.762.250
Dana bagi hasil SDA	142.500.198.853	131.675.834.421
Dana alokasi umum	696.587.039.000	787.312.332.000
Dana alokasi khusus	28.427.000.000	47.679.100.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.029.652.107.529</b>	<b>1.091.430.028.671</b>
Lain-lain Pendapatan yang sah	260.332.458.943,54	497.224.500.740
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>1.500.034.023.714,11</b>	<b>1.946.659.693.576,39</b>

Sumber : Data Olahan dari Pemerintah Kota Palembang 2010-2011

Berdasarkan tabel 3.3, tahun 2010 hingga tahun 2011 terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 147.955.706.924,42 (70,44%). Pendapatan dari dana perimbangan atau pendapatan transfer mengalami kenaikan Rp 61.777.921.142 (6%). Pos lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami kenaikan Rp 236.892.041.796,46 (91%), sehingga total pendapatan mengalami kenaikan yang berarti sebesar Rp 446.625.669.862,88 atau 29,77%.

### 3.2 Rasio Keuangan Daerah

PAD yang diperoleh suatu pemerintah akan memungkinkan pemerintah menyelenggarakan otonomi daerah. Akan tetapi, PAD yang cukup juga tidak menjadi jaminan bahwa otonomi daerah dapat berhasil dilakukan karena pengelolaan PAD yang tidak tepat akan menghambat penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, dibutuhkan suatu pengukuran (analisis rasio) guna mengetahui kecenderungan pos-pos pada pelaporan keuangan setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui keputusan apa yang perlu

diambil guna memperbaiki dan mempertahankan posisi keuangan sehingga dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan baik. Rasio yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut yaitu:

#### a. Analisis Rasio Kemandirian

##### a.1 Rasio Kemandirian 2007

$$\text{Formula} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{131.549.084.692,20}{1.084.738.647.355,61} \times 100\% = 12,12\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{51.475.000.000}{1.084.738.647.355,61} \times 100\% = 4,74\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{55.999.049.227}{1.084.738.647.355,61} \times 100\% = 5,16\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{PHPKD yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{2.750.000.000}{1.084.738.647.355,61} \times 100\% = 0,25\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Lain-lain yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{21.325.035.465,20}{1.084.738.647.355,61} \times 100\% = 1,96$$

$$2009 = \frac{56.477.729.450}{1.336.735.285.945,76} \times 100\% = 4,22\%$$

### a.2 Rasio kemandirian tahun 2008

$$\text{Formula} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2008 = \frac{172.315.274.148}{1.209.867.224.532,39} \times 100\% = 14,24\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2008 = \frac{69.350.000.000}{1.209.867.224.532,39} \times 100\% = 5,73\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2008 = \frac{65.322.735.137}{1.209.867.224.532,39} \times 100\% = 5,39\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{PHPKD yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2008 = \frac{8.000.000.000}{1.209.867.224.532,39} \times 100\% = 0,66\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Lain-lain yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2008 = \frac{29.632.539.011}{1.209.867.224.532,39} \times 100\% = 0,02\%$$

### a.3 Rasio kemandirian tahun 2009

$$\text{Formula} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2009 = \frac{218.592.661.810}{1.336.735.285.945,76} \times 100\% = 16,35\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2009 = \frac{87.485.932.360}{1.336.735.285.945,76} \times 100\% = 6,54\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2009 = \frac{64.629.000.000}{1.336.735.285.945,76} \times 100\% = 4,83\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{PHPKD yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2009 = \frac{10.000.000.000}{1.336.735.285.945,76} \times 100\% = 0,74\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Lain-lain yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### a.4 Rasio kemandirian tahun 2010

$$\text{Formula} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{210.049.457.241,57}{1.517.380.634.478,11} \times 100\% = 13,84\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{93.420.835.800}{1.517.380.634.478,11} \times 100\% = 6,15\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{74.393.402.273}{1.517.380.634.478,11} \times 100\% = 4,90\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{PHPKD yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{20.000.000.000}{1.517.380.634.478,11} \times 100\% = 1,31\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Lain-lain yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{22.235.219.168,57}{1.517.380.634.478,11} \times 100\% = 1,48\%$$

### a.5 Rasio kemandirian tahun 2011

$$\text{Formula} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2011 = \frac{358.005.164.165,99}{1.946.659.693.576,99} \times 100\% = 18,39\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2011 = \frac{172.117.431.035}{1.946.659.693.576,99} \times 100\% = 8,84\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Retribusi daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2011 = \frac{90.795.550.515,69}{1.946.659.693.576,99} \times 100\% = 4,66\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{PHPKD yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2011 = \frac{25.570.000.000}{1.946.659.693.576,99} \times 100\% = 1,31\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Lain-lain yang dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2011 = \frac{69.522.182.615,30}{1.946.659.693.576,99} \times 100\% = 3,57\%$$

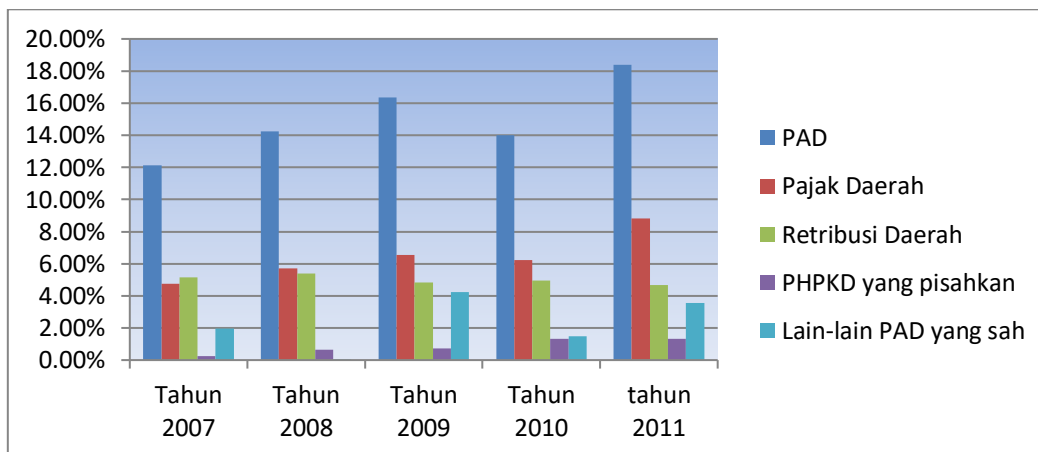
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, rekapitulasi rasio

kemandirian dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Rasio Kemandirian**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Keterangan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
PAD	12,12%	14,24%	16,35%	14%	18,39%
Pajak Daerah	4,47%	5,73%	6,54%	6,22%	8,84%
Retribusi Daerah	5,16	5,39%	4,83%	4,95%	4,66%
PHPKD yang dipisahkan	0,25%	0,66%	0,74%	1,33%	1,31%
Lain-lain PAD yang sah	1,96%	0,02%	4,22%	1,48%	3,57%

Berdasarkan tabel 3.4, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Pada tahun 2008 terjadi kenaikan pos PAD. Rasio kemandirian dari pendapatan pajak daerah yang diterima 5,73% dari total pendapatan, artinya penerimaan dari pajak atas potensi daerah yang dimiliki telah mampu membiayai 5,73% dari total pembiayaan yang dilakukan. Dari pos retribusi daerah, rasio kemandirian 5,39%, artinya pendapatan retribusi diperoleh dari pemanfaatan potensi daerah dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebesar 5,39% dari total pembiayaan. Pendapatan yang diterima dari PHPKD yang dipisahkan menunjukkan rasio

kemandirian sebesar 0,66%, artinya pendapatan yang diterima dari PHPKD telah mampu membiayai 0,66% pembiayaan. Untuk pendapatan yang diterima dari lain-lain PAD yang sah menunjukkan rasio kemandirian sebesar 0,22 yang artinya pendapatan dari pos tersebut telah mampu membiayai 0,22 dari total pembiayaan yang dilakukan. Demikian pula untuk tahun 2009 sampai 2011 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan PAD serta komponennya.

Sesuai standar kemandirian yang digunakan oleh BAPPENAS dalam menilai kinerja aparatur



pemerintahan, bahwa suatu pemerintahan dikatakan mandiri apabila PAD yang dimiliki telah mampu membiayai minimal 25% pembelanjaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pada tahun 2007-2011 kemampuan pemerintah kota Palembang belum mencapai target minimal kemandirian. Sebaiknya, dengan potensi alam dan sumber daya yang ada, pemerintah kota Palembang mampu menghasilkan PAD jauh lebih besar dari yang dimiliki saat ini.

**b. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah kota Palembang dengan pemerintah pusat/provinsi dalam mengelola keuangan daerahnya, maka dilakukan analisis terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah dengan

menggunakan formula dari Halim (2007)

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2007 = \frac{837.617.149.177}{1.084.738.647.355,61} \times 100\% = 77,21\%$$

$$2008 = \frac{920.854.185.697}{1.209.867.224.532,39} \times 100\% = 76,11\%$$

$$2009 = \frac{963.652.734.054}{1.336.735.285.945,76} \times 100\% = 72,09\%$$

$$2010 = \frac{1.029.652.107.529}{1.500.034.023.714,11} \times 100\% = 68,64\%$$

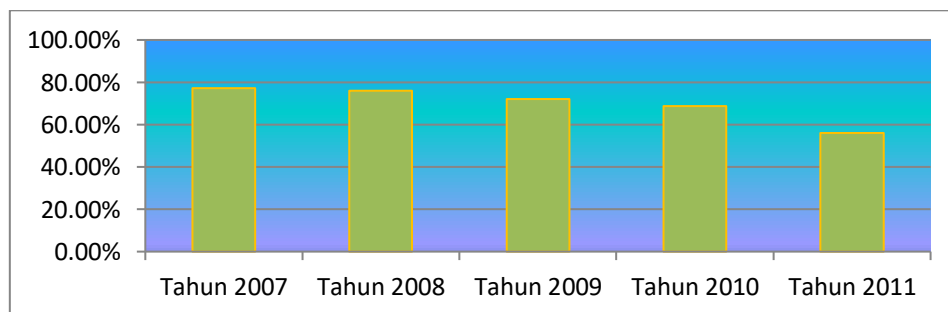
$$2011 = \frac{1.091.430.028.671}{1.946.659.693.576,99} \times 100\% = 56\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rekapitulasi rasio ketergantungan keuangan daerah kota Palembang tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Keteranagan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Rasio Ketergantungan	77,21%	76,11%	72,09%	68,64%	56%

Selanjutnya hasil rekapitulasi rasio ketergantungan keuangan daerah dapat ditunjukkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



**Gambar 3.2**  
**Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Kota Palembang**

Pada tahun 2008 rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah kota Palembang adalah 76,11% yang berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota Palembang terhadap pemerintah pusat/provinsi yaitu 76,11%. Pada tahun 2009-2011 rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah kota Palembang semakin menurun. Artinya, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat/provinsi sudah semakin berkurang.

#### **IV Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Tingkat kemandirian pemerintah kota Palembang masih dibawah 25% artinya pemerintah atau pengelolaan keuangan daerah belum dapat mengoptimalkan PAD yang ada. Namun demikian dari tahun 2008-2011 rasio ketergantungannya pada pemerintah pusat/provinsi mengalami kemajuan yaitu semakin menurun. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

##### **2. Saran**

Pemerintah hendaknya terus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak daerah dan lebih meningkatkan lagi pemanfaatan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki sehingga PAD dapat lebih dioptimalkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan cara membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 20026. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hariwijaya, M dan Basari M. Djaelani. 2008. *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Zenith Publisher.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.

Nadeak, Ruslina. 2003. *Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta :Universitas Sanata Dharma.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Penerbit Alfabeta,

Tanjung, Abdul Hafiz. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Yani, Ahmad 2004. *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada.